

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN
PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Kasus OPD Kota Semarang)



Skripsi

Karya Tulis Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Program S-1 Akuntansi

Disusun Oleh:

Muhammad Purwanto

11201151

**Program Studi Akuntansi
STIE BANK BPD JATENG**

2024

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN,
PENGENDALIAN AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

(Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)

Muhammad Purwanto
11201151

Program Studi Akuntansi STIE Bank BPD Jateng
muhamadporwanto@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kota Semarang. Populasi dalam penelitian ini adalah 16 Instansi Kecamatan di Kota Semarang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 41 responden. Responden terpilih adalah kepala subbagian keuangan dan staff keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan *partial least square (PLS)* alat analisis *smartPLS* dengan metode *Structural Equation Modeling (SEM)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: *Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*

Abstract

This research aims to examine the influence of Clarity of Budget Targets, Reporting Systems, Accounting Controls on Performance Accountability of Government Agencies in the City of Semarang. The population in this study were 16 sub-district agencies in Semarang City. The sample used in this research was 41 respondents. The selected respondents were heads of finance sub-divisions and finance staff. Data analysis was carried out using partial least squares (PLS) smartPLS analysis tool with the Structural Equation Modeling (SEM) method. The results of this research show that clarity of budget targets and reporting systems have a positive and significant effect on performance accountability of government agencies, while accounting controls have no effect on performance accountability of government agencies.

Keywords: clarity of budget objectives, reporting system, accounting control, performance accountability of government agencies

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini, isu akuntabilitas di sektor pemerintah menjadi perhatian. Isu ini semakin populer karena perubahan zaman yang telah terjadi di kehidupan masyarakat. Perubahan zaman mempengaruhi pemikiran masyarakat mengalami perkembangan dan akan meningkatkan tingginya tuntutan masyarakat. Di Indonesia, sektor pemerintahan merupakan sektor yang paling tertinggi melingkupi organisasi pemerintah pusat sampai daerah. Sebelum adanya peristiwa krisis ekonomi semua tanggung jawab dan wewenang di pemerintahan yaitu tugas pemerintah pusat. Pada tahun 2001 desentralisasi mengalihkan berbagai tugas wewenang dari pusat kepada daerah. Peristiwa ini untuk memudahkan organisasi pemerintah daerah dalam mengelola kegiatannya berjalan dengan baik dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja adalah sebuah pertanggungjawaban pemerintah terhadap masyarakat dalam melaksanakan visi dan misinya apakah mengalami kegagalan atau mengalami keberhasilan. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia no 7 tahun 1999 Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Penetapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pelaksanaan dari PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap entitas wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja atas pelaksanaan APBN/APBD.

Pemerintah Kota Semarang berhasil memperoleh capaian opini LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) yaitu dengan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) selama 7 kali berurutan. Artinya Kota Semarang mampu menerapkan pemerintahan yang akuntabel, terampil, efisien, dan transparan dalam mengelola maupun melaporkan kinerjanya. Meskipun predikat yang baik, tetapi masih ada masalah ditemukan yaitu tidak mencapainya target nilai akuntabilitas kinerja pemerintah. Berdasarkan hasil penilaian akuntabilitas kinerja provinsi, Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2021 memperoleh nilai capaian 69,44% atau mendapat peringkat B, tetapi capaian ini belum berhasil karena tidak mencapai targetnya yaitu 70,00%.

Kegagalan target akuntabilitas kinerja di Kota Semarang adalah terjadinya permasalahan tentang penurunan penilaian kinerja pemerintah Kecamatan di Kota Semarang yaitu pada tahun 2020 mencapai realisasi 100%, tetapi pada tahun 2021 realisasinya 87,13%. Masalah-masalah yang terjadi di pemerintah Kecamatan Kota Semarang yaitu (Kecamatan Tembalang, 2021) terjadinya refocusing anggaran dan tidak tercapainya target pendapatan daerah Kota Semarang. Berdasarkan (Kecamatan Mijen, 2023) terjadinya anggaran yang tidak mencapai target dengan rinciannya terdiri dari targetnya 60,00% berhasil mencapai realisasi sebesar 58,00%. Sedangkan berdasarkan (Kecamatan Semarang Utara, 2023) telah terjadinya keterbatasan anggaran seperti anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program-program dalam mencapai sasaran kurang memadai. Masalah lain yaitu pada tahun 2019 – 2022 Kecamatan Tugu mengalami penurunan nilai SAKIP bahwasannya diketahui tahun 2019 memperoleh nilai 74,9, tahun 2020 memperoleh nilai 72,55, tahun 2021 memperoleh nilai 72,55, dan tahun 2022 memperoleh nilai 70,01 (Pemerintah Kota Semarang, 2023).

Peran anggaran merupakan hal penting dalam lingkup pemerintah daerah terutama dalam mencapai keberhasilan tujuannya. Namun anggaran seringkali disalahgunakan dan menyalahi aturan undang-undang meliputi tindakan fraud, korupsi dan penggelapan anggaran. Tindakan tersebut terjadi diakibatkan pemerintah tidak cakap dalam menerapkan kejelasan sasaran anggaran. Kejelasan adalah bagaimana target anggaran yang dialokasikan dapat dinyatakan dengan tepat dan spesifik, dikelola dengan baik, dan memiliki sifat transparansi yang tinggi sehingga nantinya mampu mewujudkan tercapainya akuntabilitas kinerja.

Hal lain yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sistem pelaporan. Sistem pelaporan dapat mengukur, memantau, mengendalikan, mengawasi dan mengontrol kinerja manajer pemerintah dalam menerapkan anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Sistem pelaporan bertanggung jawab penuh dalam memberikan informasi atas tindakan yang dilakukan dalam penggunaan anggaran terhadap pihak internal, eksternal atau pihak yang berkepentingan. Sehingga implementasi sistem pelaporan di pemerintahan harus selalu diperkuat, jika tidak maka kinerja pemerintahan akan menurun.

Setelah implementasi sistem pelaporan organisasi sektor publik sangat perlu adanya pengawasan atau pemantauan berkaitan dengan anggaran. Hal ini agar sebuah organisasi dapat terkontrol dalam menjalankan visi misinya dan melakukan evaluasi dengan baik. Apalagi dalam pencatatan akuntansi, organisasi sangat membutuhkan pengendalian agar mencegah terjadinya fraud. Penggunaan pengendalian akuntansi juga dimaksudkan untuk menghindari dana yang nganggur dalam aktivitas organisasi. Selain itu adanya pengendalian akuntansi dapat menjadikan anggaran organisasi terstruktur. Sebaliknya jika pengendalian akuntansi tidak diterapkan dengan baik di dalam pemerintahan akan menyebabkan penyalahgunaan tanggungjawab anggaran.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Susanti & Irianto, 2023), (Radhiana & Roza, 2022) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan (Septiani et al., 2022) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan, (Sari, 2021), (Mile et al., 2023) menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian yang dilakukan (Azmi et al., 2023) menunjukkan bahwa Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan (Maharani et al., 2022), (Harianto et al., 2021) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah sedangkan (Azmi et al., 2023) menunjukkan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas instansi pemerintah daerah.

Selain itu, beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian sebelumnya hanya berfokus pada objek penelitian di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang ada di Dinas Daerah, tetapi belum ada peneliti sebelumnya yang berfokus pada objek penelitian meliputi Pemerintahan Kecamatan. Menurut (Harianto et al., 2021) menggunakan objek penelitian Dinas Kabupaten Rokan Hilir. Menurut (Susanti & Irianto, 2023) menggunakan objek penelitian Dinas Sosial Kabupaten Pematang. Menurut (Maharani et al., 2022) menggunakan objek penelitian inspektorat, Dinas, Badan, Satpol PP, PDAM, dan RSUD Kabupaten Manokwari.

Berdasarkan uraian dan fenomena serta ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu, penulis memiliki motivasi untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu: Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan mengambil objek penelitian yaitu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, pertanyaan yang muncul berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang?
2. Apakah Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang?
3. Apakah Pengendalian Akuntansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota semarang. Dengan pengujian tersebut diharapkan memperoleh bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang. Secara terperinci sebagai berikut:

1. Memperoleh bukti empiris pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang.
2. Memperoleh bukti empiris pengaruh sistem pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang.
3. Memperoleh bukti empiris pengaruh pengendalian akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang dan menjadi bahan pertimbangan, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dimasa mendatang serta memberikan pemahaman khususnya mengenai pengungkapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota semarang. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi pengetahuan bahan diskusi dan kajian lanjut bagi pembaca mengenai masalah yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Semarang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dilakukan untuk memberi bahan pertimbangan mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Tidak kalah pentingnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota semarang. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi

untuk penelitian mengenai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Semarang berikutnya.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi masyarakat untuk menilai baik buruknya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam satu periode pemerintahan. Karena masyarakat yang diwakili oleh DPR merupakan pengawas kegiatan legislatif.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian selanjutnya terutama berkaitan dengan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan pengendalian akuntansi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota Semarang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori agensi menggambarkan tentang hubungan kerja antara prinsipal (masyarakat) dengan agensi (pemerintahan). Sedangkan menurut (Jensen & Meckling, 1976) juga mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak lebih dari satu pemilik (*principal*) menggunakan orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa kepentingan mereka dengan memercayakan beberapa wewenang dalam pembuatan keputusan kepada agent. Dalam teori ini prinsipal berperan sebagai pemilik sedangkan agensi berperan sebagai manajemen (Harianto et al., 2021). Teori agensi pada sektor publik menjelaskan masyarakat sebagai prinsipal dalam hubungan keagenan mempunyai hak untuk mendapatkan pertanggungjawaban dari kinerja pemerintah yang akuntabel. Selain itu prinsipal berperan dalam memberikan evaluasi kepada kinerja pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam tanggungjawab dan amanah yang diemban. Sedangkan agensi menjalankan tugas sebagai perantara dalam mewujudkan pelayanan yang baik kepada publik dan dapat mencapai tujuan kinerjanya.

Implikasi *Agency Theory* ini, keberadaan principal adalah rakyat secara langsung perlu melakukan pengawasan kepada agent (pemerintahan). Dalam hal ini rakyat menginginkan pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara periodik. Pemerintah sebagai lembaga yang menjalankan tugas pertanggungjawaban keuangan yang dipercayakan kepadanya dituntut prinsipal untuk mencapai tujuan ekonomi, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap semua aktivitas yang dilakukan di dalam pemerintahan. Menurut (Putra, 2021) Akuntabilitas Sektor Publik adalah metode yang diterapkan untuk mengelola dana masyarakat dan memberikan informasi baik bagi pemerintah sebagai manajemen maupun bagi publik.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menggambarkan bagaimana wujud pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya apakah berhasil dalam mencapai target maupun tujuan atau sebaliknya memperoleh kegagalan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Bab 1 Pasal 1 Ayat 16 menjelaskan akuntabilitas kinerja adalah

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Tingginya tuntutan masyarakat saat ini menjadikan pemerintah harus meningkatkan kinerjanya dan selalu melakukan evaluasi. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan metode penunjang akuntabilitas yang meliputi kegiatan perancangan, penganggaran dan pelaporan. Kegiatan perancangan nantinya harus jelas dan memenuhi sasaran, kegiatan penganggaran harus menggunakan pengendalian akuntansi yang baik dan kegiatan pelaporan harus memanfaatkan sistem pelaporan agar laporan tepat waktu.

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran dapat mengukur sejauhmana tujuan anggaran dikelola secara jelas dan terarah serta mudah dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut (Maharani et al., 2022). Anggaran yang nyata dan jelas pengelolaannya dapat mempermudah dalam keberhasilan tujuan kinerja pemerintah (Harianto et al., 2021). Kejelasan sasaran anggaran adalah keefektifan pemerintah sektor publik dalam melaksanakan tujuan anggaran secara transparan dan dapat meningkatkan capaian yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah yang memiliki kejelasan dalam mengelola anggaran dengan cara yang tepat akan memberikan gambaran bahwa kinerjanya baik (Azmi et al., 2023).

2.1.4 Sistem Pelaporan

Sistem pelaporan menggambarkan suatu entitas dalam pertanggungjawaban penyajian laporan yang terdiri dari bawahan kepada atasan (Pratama et al, 2019). Sistem pelaporan yang baik sangat diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan, serta mampu memberikan informasi yang akurat, relevan, tepat waktu, konsisten serta dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan (Sari, 2021). Sedangkan menurut pendapatnya (Mile et al., 2023) bahwa sistem pelaporan yang baik dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan.

2.1.5 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah pengukuran sebuah prosedur kebijakan yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan kegiatan sebuah organisasi berkaitan tentang data keuangan dengan tujuan untuk mengawasi tindakan fraud. Pengendalian akuntansi bermakna prosedur, perencanaan dan sistem pelaporan (Azmi et al., 2023). Sedangkan berdasarkan definisi (Putra, 2021) bahwa pengendalian akuntansi merupakan suatu rencana tindakan atau standar untuk mengukur prestasi pelaksanaan kegiatan. Tindakan ini berguna untuk meningkatkan kemajuan kapabilitas kinerja di dalam sebuah organisasi. Tujuan penting dari pengendalian akuntansi adalah mengontrol keluar dan masuknya dana anggaran. Selain itu pengendalian akuntansi juga dapat membantu dalam menetapkan standar pencatatan yang sesuai untuk setiap transaksi keuangan sehingga meminimalkan kesalahan dalam pencatatan (Maharani et al., 2022).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Susanti & Irianto, 2023) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas sosial Kabupaten Malang, (2) Pengendalian akuntansi berpengaruh negative terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas sosial Kabupaten Malang, (3) Tingkat kemandirian berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas sosial Kabupaten Malang.

Penelitian (Septiani et al., 2022) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Solok, (2) Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Solok.

Penelitian (Azmi et al., 2023) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, (2) Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, (3) Sistem pelaporan tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Istimewa Yogyakarta, (4) Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian (Sari, 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru, (2) Penerapan akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru, (3) Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Pekanbaru.

Penelitian (Putra, 2021) dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi (2) Penerapan akuntansi sektor publik berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi (3) Pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi (4) Ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian (Harianto et al., 2021) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir, (2) Pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir, (3) Sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir, (4) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Rokan Hilir.

Penelitian (Maharani et al., 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Manokwari, (2) sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Manokwari, (3) Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Manokwari, (4) Partisipasi anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Di Kabupaten Manokwari..

Penelitian (Mile et al., 2023) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *Clarity Of Budget Targets have a significant effect on Government Agencies' Performance Accountability*, (2) *Government Accounting Standards Have A Positive Effect on Government Agencies' Performance Accountability*, (3) *Reporting Systems Have A positive Effect on Government*.

Penelitian (Radhiana & Roza, 2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) *The clarity of budget targets has a positive effect on Government Agencies' Performance Accountability*, (2) *Organizational culture has a positive effect on Government Agencies' Performance Accountability*.

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Anggaran merupakan perkiraan jumlah uang mengenai dengan penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk pengelolaan kegiatan dalam satu periode. Tujuan utama organisasi pemerintah publik adalah kejelasan sasaran anggaran (Sari, 2021). Kejelasan sasaran anggaran merupakan sebuah anggaran yang telah dikelola dan bersifat akuntabel, transparansi dan akurat. Selain itu anggaran yang dikelola dengan jelas dan tepat sasaran akan menggambarkan bahwasannya kinerjanya mencapai atau mampu mewujudkan tujuan kinerjanya. Hal ini bertaitan dengan teori *Agency* yang menjelaskan bahwa keberadaan pemerintah sebagai lembaga pelaku pelaksanaan kegiatan terhadap masyarakat harus menjalankan tugas dan fungsi dalam mengelola keuangan secara tepat dan akurat sehingga mampu mencapai tujuan. Oleh sebab itu anggaran harus dikelola dengan jelas dan tepat sasaran agar mudah dipahami oleh pegawai yang bertanggungjawab menyusun anggaran sehingga membantu tujuannya yang ingin dicapai. Menurut (Susanti & Irianto, 2023), (Radhiana & Roza, 2022), (Azmi et al., 2023) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uraian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H1: Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Bentuk keberhasilan sebuah organisasi sektor publik yaitu ketika sebuah organisasi mampu menyampaikan laporan secara transparan, akuntabel dan mudah di pahami. Selain itu laporan yang baik adalah laporan yang menggunakan sistem pelaporan baik. Sistem pelaporan merupakan sistem yang digunakan untuk memfasilitasi sebuah organisasi sektor publik dalam pelaporan kepada pemerintah. Berdasarkan tujuannya sistem pelaporan adalah memberikan kemudahan pegawai atau instansi dalam melaporkan pekerjaan, memberikan pengelola organisasi sektor public dalam pemantauan dan

pengendalian program kegiatan, meningkatkan kinerja dengan efisien dan efektivitas dalam mengatur anggaran, waktu dan SDM, dan memudahkan dalam pelaporan monitoring kegiatan fisik kepada beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (jombangkab.go.id, 2021). Hal ini sejalan dengan teori *Agency* bahwa sistem pelaporan menjadi penghubung organisasi sektor publik kepada pemerintah maupun masyarakat dalam melaporkan tugas dan amanahnya bertanggungjawab atas kinerjanya terhadap program yang dilakukan sebagai wujud akuntabilitas. Menurut (Sari, 2021), (Mile et al., 2023), (Putra, 2021) bahwa pengaruh sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uraian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H2: Sistem Pelaporan Berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

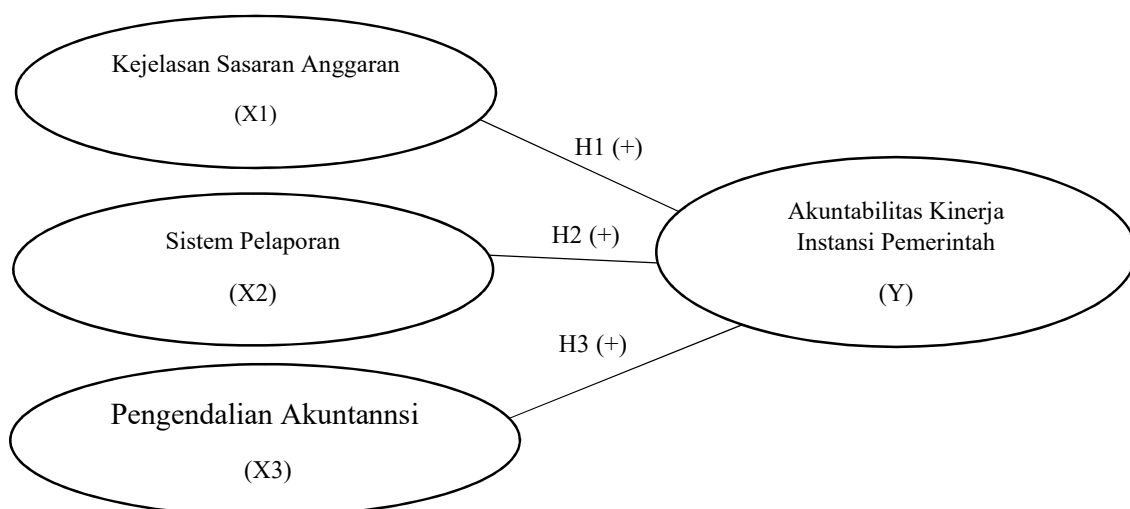
2.3.3 Pengaruh Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengendalian akuntansi merupakan metode yang telah diatur dan ditetapkan sebuah instansi untuk mengontrol validitas dan keakuratan laporan keuangan serta informasi akuntansi yang disampaikan. Selain itu Informasi akuntansi penting bagi pengguna karena dapat meningkatkan penilaian dan keputusan dengan lebih baik (Yusliana dan Nadirsyah, 2017). Semakin terkendalinya akuntansi dalam sebuah organisasi maka akan mencegah terjadinya fraud atau penyimpangan keuangan, pencatatan anggaran masuk dan keluar terkontrol dengan baik dan mampu mewujudkan kinerja yang akuntabel, efektif dan efisien. Dari uraian diatas pengendalian akuntansi sejalan dengan *theory Agency* dimana dalam theory ini pemerintah harus menggunakan metode akuntansi yang akurat untuk kepuasan masyarakat dalam bentuk fasilitas pelayanan. Menurut (Maharani et al., 2022), (Harianto et al., 2021), (Putra, 2021) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uraian teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

H3: Pengendalian Akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.4 Model Penelitian

Gambar 1 Model Penelitian



3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi adalah sebuah objek yang digunakan untuk kegiatan penelitian mempunyai karakteristik dan kualitas tersendiri sehingga dapat menghasilkan kesimpulan. Populasi dalam penelitian ini menggunakan seluruh OPD dengan kategori Kecamatan di Kota Semarang yang terdiri dari 16 instansi.

3.2 Sampel

Sampel merupakan kelompok kecil dari seluruh populasi. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti adalah *purposive sampling*. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah pejabat di OPD kategori Kecamatan berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam menyusun, menyajikan, mengelola dan melaporkan keuangan. Pejabat yang dimaksud meliputi Kepala sub bagian keuangan, bendahara pengeluaran, dan staf keuangan.

3.3 Definisi Operasional

3.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban setiap organisasi sektor publik dalam mempertanggungjawabkan visi dan misi yang dilaksanakan apakah mengalami keberhasilan atau kegagalan. Menurut Ellwood 1993 dalam (Mardiasmo, 2018) menjelaskan empat indikator yang harus dipenuhi dalam akuntabilitas organisasi sektor publik, yaitu:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum (*Accountability For Probity And Legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*Process Accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*Program Accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*Policy Accountability*)

3.3.2 Variabel Independen

3.3.2.1 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kejelasan sasaran anggaran merupakan pengukuran tujuan pengelolaan anggaran yang dilakukan setiap organisasi sektor publik. Menurut (Agustin, 2018) variabel kejelasan sasaran anggaran diukur dengan lima indikator, yaitu:

1. Kesesuaian rencana kerja dan anggaran dengan RAPBD
2. Sasaran anggaran yang jelas dan spesifik
3. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran secara efektif
4. Faktor – faktor yang mendukung tujuan instansi
5. Ketepatan anggaran dan realisasi

3.3.2.2 Sistem Pelaporan.

Sistem pelaporan adalah metode pertanggungjawaban yang digunakan setiap instansi dalam melakukan laporan bawahan kepada atasan yang berhubungan dengan pengelolaan anggaran. Menurut (Wirdayanti & Pancawardani, 2020), variabel Sistem Pelaporan menjelaskan lima indikator, yaitu:

1. Penyajian laporan keuangan secara lengkap.
2. Informasi dalam laporan keuangan digunakan sebagai alat koreksi.
3. Informasi keuangan disajikan untuk memenuhi kebutuhan umum bukan kebutuhan khusus.
4. Laporan keuangan dapat diuji.

5. Informasi keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.

3.3.2.3 Pengendalian Akuntansi

Pengendalian akuntansi adalah sistem yang mengontrol aturan dan prosedur pencatatan akuntansi laporan keuangan yang akurat dan valid. Menurut (Wirdayanti & Pancawardani, 2020), Variabel Pengendalian Akuntansi menjelaskan empat indikator yaitu:

1. Pemisahan fungsi
2. Prosedur pemberian wewenang
3. Prosedur dokumentasi
4. Prosedur dan catatan akuntansi pemisahan fungsi

3.4 Metode Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah menggunakan data primer. Di mana data ini diperoleh secara langsung di lapangan. Data primer dapat mempermudah kevalidan data dan transparansi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menyebar kuesioner beserta pertanyaan kepada responden sasaran dan sesuai kualifikasi. Alur pengumpulan data yaitu peneliti mengedarkan kuesioner kepada responden yang berkaitan, data diambil dan diperoleh ketika responden berhasil mengisi kuesioner yang didistribusikan. Setelah data diperoleh kemudian peneliti mengolah, menguji atau menganalisis data menggunakan alat analisis *Smart PLS Versi 4*. Bertujuan untuk menguji kelayakan data dan menghasilkan kesimpulan dalam hipotesis yang menarik. Selain itu penelitian ini menggunakan dua tahapan pengujian yaitu Uji Outer model dan uji inner model.

Skala likert adalah skala yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang telah diukur dengan cara diberi skor atau nilai. Kemudian untuk kategori pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju, tidak setuju, kurang setuju, setuju atau sangat setuju dengan memberi tanda centang \surd pada salah satu kolom nilai yang dianggap paling mewakili kondisi. Penelitian ini menggunakan nilai yang berbeda yaitu:

1. Sangat tidak setuju (STS) = 1
2. Tidak setuju (TS) = 2
3. Kurang Setuju (KS) = 3
4. Setuju (S) = 4
5. Sangat Setuju (SS) = 5

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan menggambarkan pengujian demografi responden penelitian (nama, responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Selain itu menggambarkan hubungan teori dan data dalam menentukan kriteria rata-rata variabel.

3.5.2 Uji Kelayakan Instrumen (Outer Model)

Model pengukuran pada Analisis *SmartPLS* adalah untuk menguji instrumen yang digunakan dalam penelitian apakah layak atau tidak dan suatu variabel mempunyai hubungan dengan beberapa indikatornya. Pengukuran ini mempunyai dua tahap pengujian yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Validitas merupakan konsep pengukuran yang menunjukkan suatu kevalidan dari instrumen. Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji validitas konvergen dan nilai AVE serta uji validitas

konvergen. Uji validitas konvergen dapat dilakukan dengan melihat nilai *outer loading* dengan ketentuan harus lebih besar dari nilai kritis 0,7. Sementara nilai AVE menunjukkan kemampuan variabel dalam menjelaskan varians yang berasal dari indikatornya dengan ketentuan lebih besar dari nilai kritis yaitu sebesar 0,5 (Hair et al., 2014). Sedangkan uji validitas diskriminan yaitu untuk mengukur sejauhmana suatu variabel dapat berbeda dari variabel lain dan teruji secara statistik. Validitas diskriminan dapat dilakukan dengan melihat nilai cross loading untuk variabel harus 0,70. Nilai discriminant validity dapat diterima jika nilai Average Variance Extracted (AVE) > korelasi antar konstruk laten (Hair et al., 2014).

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan aspek penting yang menunjukkan kemampuan kuesioner dapat konsisten dan dapat diandalkan dalam mengukur konstruk. Reliabilitas dalam pengujiannya terdiri dari *Cronbach's Alpha* dengan nilai di atas 0,7 dan nilai *Composite Reliability* dengan ketentuan nilai sebesar di atas 0,7 (Santosa, 2018).

3.5.3 Model Struktural (Inner Model)

Uji pada model structural dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Dalam model structural terdapat tiga pengukuran yaitu mengukur nilai koefisien β (mengetahui arah hubungan), uji t (mengetahui kemaknaan hubungan), dan nilai koefisien determinasi (R^2) mengetahui nilai penjelasan variabel-variabel respon (Santosa, 2018).

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Alat uji ini digunakan untuk menguji seberapa besar validnya hubungan variabel dependen dengan variabel independent. Koefisien Jalur (path coefficients) adalah nilai yang dihasilkan untuk dapat melihat hubungan pada setiap variabel. Nilai koefisien jalur berada pada rentang -1 sampai +1. Dengan rentang +1 mewakili hubungan positif yang kuat dan rentang -1 mengindikasikan hubungan yang negatif. Pengujian koefisien jalur pada SEM-PLS dilakukan melalui suatu prosedur yang ada pada bootstrapping (Hair et al., 2014) Hubungan dapat diterima jika p value < 0,05 sedangkan p value > 0,05 artinya ditolak. Sedangkan pengaruh hasil signifikan adalah t statistic > 1,96.